

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk politik. Sebagai makhluk politik, ia menata hidup secara komunal melalui politik untuk mencegah kekacauan dan mencapai kebaikan dengan menjalani cara hidup tertentu, seperti menghindari sikap individualistik dan patrimonial. Sikap individualistik dan patrimonial tercermin pada kehidupan pra-politik, masa di mana manusia memiliki pengetahuan, tetapi cenderung memanfaatkan pengetahuannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta tidak memperhatikan kepentingan bersama.¹ Melalui kehidupan politik manusia mengalami perkembangan yang signifikan karena ia tidak hanya memahami diri, tetapi juga memahami orang lain dan persoalan hidup dalam konteks universalitas yang mendasarkan cara hidup pada apa yang baik dan adil bagi setiap orang (*bonum publicum*).² Ketika membentuk kehidupan politik, Aristoteles menulis, “*the end of the state is good life*” (tujuan akhir dari sebuah negara adalah kehidupan yang baik).³ Maka, kehidupan politik adalah kehidupan yang baik karena berhubungan erat dengan upaya mencapai kebaikan bagi setiap orang.

Politik sejatinya tidak dapat lepas dari kehidupan. Aktivitas politik berurusan dengan upaya terus-menerus mencapai kebaikan bagi kehidupan subjek politik. Hal ini telah dimulai sejak peradaban klasik, ketika Aristoteles membentuk dan meletakkan kehidupan politik sebagai sebuah komunitas yang paling utama untuk mencapai kebaikan. Aristoteles menulis dalam *Politics* (1252.a.1),

¹“Kehidupan pra-politik adalah keadaan alamiah manusia. Di dalam keadaan alamiah manusia fokus menggunakan kapasitas pengetahuannya untuk kepentingan diri. Pengetahuan manusia menurut Aristoteles seperti sebuah anak panah. Pertanyaannya adalah ke mana anak panah diarahkan? Maka, politik sebagai *master art*, memberikan pengetahuan dalam sebuah negara untuk mengarahkan pengetahuan manusia demi kebaikan banyak orang.” Bdk. Jonathan Barnes (ed.), *The Complete Works of Aristotle Volume I and II*, (United Kingdom: Princeton University Press, 1984), hlm. 3719-3720.

²Bdk. Dr. Felix Baghi, SVD, “Arkeologi Politik dan Keadaan Darurat Giorgio Agamben,” (ms) Kelas Rasionalitas dalam *Youtube Circles Indonesia*, diakses pada 27 Maret 2024.

³Aristoteles, *Politics*, p. 1280.b, dalam Bertrand Russel, *The History of Western Philosophy*, (New York: Simon and Schuster, 1945), hlm. 186.

Every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good; for mankind always act in order to obtain that which they think good. But, if all communities aim to some good, the state or political community, which is the highest good of all, and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good.⁴

Aristoteles lalu membedakan kehidupan politik (*polis*) dari kehidupan keluarga (*oikos*). Seorang raja atau kepala keluarga (*despotes*) memimpin *oikos* di mana kekuasaan dan aturan menjadi urusan personal. Di pihak lain, kepala negara (*oikonomos*) mengatur dan memimpin *polis* menurut pengetahuan atau kaidah politik, sehingga aturan merupakan aturan dari rakyat dan warga negara memimpin secara bergantian. Bagi Aristoteles *oikos* dan *polis* berbeda dalam jumlah dan jenis pemerintahan, tetapi keduanya tidak terpisah. *Oikos* adalah bagian dari *polis* dan melalui hubungan antara lelaki dan perempuan yang tinggal dalam *oikos*, *polis* dapat terbentuk.⁵ Maka, urusan politisi berurusan dengan apa yang Aristoteles maksudkan sebagai tujuan dari *oikos* untuk memproduksi kehidupan yang baik dan dari *polis* untuk menjaga kelangsungan hidup yang baik.

Lebih lanjut, Aristoteles memisahkan kehidupan yang layak dalam politik dari kehidupan yang tidak layak dalam politik. Ia memisahkan manusia dari makhluk hidup lain karena manusia memiliki bahasa. Melalui bahasa manusia membentuk keluarga dan negara yang berdasar pada norma-norma tertentu. Aristoteles melihat manusia memiliki bahasa sebagai kapasitas tambahan (*additional capacity*) untuk hidup dalam politik. Aristoteles menulis,

Man is more of a political animal than bees or any other gregarious animals is evident. Nature, as we often say, makes nothing in vain, and man is the only animal who has the gift of speech. Whereas mere voice only an indication of pleasure and pain, and found in other animals, the power of speech is intended to set forth the expedient and inexpedient, and therefore likewise

⁴“Setiap negara adalah sejenis komunitas, dan setiap komunitas didirikan dengan maksud untuk mencapai kebaikan; karena manusia selalu bertindak demi memperoleh apa yang mereka anggap baik. Namun, jika semua komunitas mempunyai tujuan yang sama, maka negara atau komunitas politik, yang merupakan kebaikan tertinggi dari semuanya, dan mencakup semua hal lainnya, mempunyai tujuan yang lebih besar dibandingkan yang lain, dan pada kebaikan yang tertinggi.” Jonathan Barnes (ed.), *op.cit.*, hlm. 4265.

⁵*Ibid.*

the just and unjust. Things are defined by their function and power and we ought not to say that they are the same when they no longer have their proper quality, but only that they are homonymous (.....). For man, when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all.⁶

Dewasa ini, terdapat pemisahan yang semakin lebar antara *oikos* dan *polis*. Kehidupan di ranah *oikos* telah masuk menjadi urusan *polis* dan politik memasuki zona ketidakjelasan (*indistinction*). Pemerintah, misalnya, menerapkan kontrol dan peraturan yang ketat atas kehidupan pada ranah privat dan segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk seksualitas, menjadi urusan pemerintah. Michael Foucault menyebut keadaan ini sebagai transformasi politik menjadi bio-politik. Melalui bio-politik negara tidak lagi menaruh perhatian pada urusan teritorial dan mulai melakukan upaya mengatur dan mengontrol kehidupan populasi masyarakat. Foucault meringkas proses peralihan politik menjadi bio-politik, “*for millennia, man remained what he was for Aristotle: a living animal with the additional capacity for a political existence; Modern man is an animal whose politics places his existence as a living being in question*”.⁷

Foucault, sebagaimana dikutip Agamben, menjelaskan dalam *The History of Sexuality*, bahwa bio-politik menyebabkan, “*a kind of bestialization of man achieved through the most shopisiticated political techniques. For the first time in history, the possibilities of the social sciences are made known, and at once it becomes possible both to protect life and to authorize holocaust*”.⁸ Foucault

⁶“Bahwa manusia lebih merupakan hewan politik dibandingkan dengan lebah atau binatang gregarius lainnya, sudah jelas. Alam, seperti yang kita katakana, tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, dan manusia adalah satu-satunya hewan yang memiliki karunia berbicara. Sementara suara belaka hanya merupakan indikasi kesenangan dan kesakitan, dan ditemukan pada hewan-hewan lain, kekuatan berbicara dimaksudkan untuk menyatakan yang bijaksana dan tidak bijaksana, dan oleh karena itu juga menyatakan yang adil dan tidak adil. Segala sesuatu ditentukan oleh fungsi dan kekuatannya dan kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka sama ketika mereka tidak lagi memiliki kualitas yang tepat, tetapi hanya bahwa mereka homonym (...) Karena manusia, ketika disempurnakan, adalah yang terbaik dari binatang, tetapi ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, ia adalah yang terburuk dari semuanya.” *Ibid.*, hlm. 4269-4270.

⁷“Selama ribuan tahun, manusia tetap seperti apa adanya bagi Aristoteles: seekor hewan hidup dengan kapasitas tambahan untuk eksistensi politik; Manusia modern adalah binatang yang politiknya mempertanyakan keberadaannya sebagai makhluk hidup.” Michael Foucault, *The History of Sexuality-Volume I: An Introduction*, penerj. Rubert Hurley, (New York, Pantheon Books, 1976) hlm. 143.

⁸“Semacam bestialisasi manusia yang dicapai melalui teknik-teknik politik yang paling canggih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kemungkina-kemungkinan ilmu sosial diketahui, dan

menyoal kelahiran bio-politik dalam dua kajian; *pertama*, rasionalisasi politik dengan model kekuasaan *bio-power* di mana hukum terlokalisasi pada instrumen-instrumen empirik dan konkret yang dekat dengan kehidupan manusia untuk mengontrol dan mengatur kehidupan individu. *Kedua*, proses subjektivisasi di mana individu berdaulat di dalam dirinya, tetapi di sisi lain meletakkan hidupnya sebagai persoalan pada kekuasaan kontrol luar.⁹ Menurut Foucault perubahan politik menjadi bio-politik merupakan rasionalisasi politik dan ekonomi di mana pemerintah fokus pada upaya maksimalisasi efisiensi subjek politik sehingga deviasi politik dan ekonomi menurun.¹⁰

Dua puluh tahun sebelum *The History of Sexuality*, Hannah Arendt dalam *The Human Condition* melihat kemunduran politik modern. Hal ini disebabkan oleh keutamaan politik yang memperhatikan kehidupan biologis individu. Politik modern justru mengabaikan praktik politik itu sendiri ketika kehidupan privat dari *homo laborans* menjadi fokus utama di dalam aktivitas politik. Berdasarkan perspektif Arendt, *holocaust* pada rezim Hitler adalah kejahatan radikal (*radical evil*). Tiga momen historis pada awal abad modern, yakni anti-semitisme, imperialisme, dan totalitarianisme merupakan kodrat kejahatan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, tetapi menghancurkan segala sesuatu di dalam dunia, termasuk kemanusiaan. Arendt menyebutnya, *worldlessness*, sebuah kondisi di mana dunia kehilangan maknanya sebagai ruang publik penampakan individu-individu yang distingtif dan bebas.¹¹

Sementara itu, Giorgio Agamben dalam *Homo Sacer I* menjelaskan keadaan politik modern yang sedang berada dalam zona ketidakjelasan karena berkaitan dengan kegagalan politik dalam memperhitungkan peristiwa-peristiwa

sekaligus menjadi mungkin baik untuk melindungi kehidupan maupun mengesahkan pembantaian.” Michael Foucault, *The History of Sexuality-Volume I*, dikutip dari Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer*, (Stanford: Stanford University Press, 2017), hlm. 7.

⁹*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰Michael Senellart (ed), *Michael Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-1979*, penerj. Graham Burchell (New York: Pak Grave Macmillan, 2008), hlm. 140.

¹¹Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian-Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. viii.

besar yang menentukan fondasi modernitas, seperti negara totaliter abad kedua puluh.¹² Agamben menjelaskan,

If politics today seems to be passing through a lasting eclipse, this is because politics has failed to reckon with this foundational event of modernity. The enigmas that our century has proposed to historical reason and that remains with us (*Nazi*) will be solved only in terrain-biopolitics-on which they were formed. Only within biopolitical horizon will it be possible to decide whether the categories whose opposition founded modern politics (right/left, private/public/, absolutism/democracy), and which have been steadily dissolving, to the point of entering today into a real zone of indistinction.¹³

Bagi Agamben, peristiwa ini masih terus berlangsung hingga saat ini dan mengakibatkan politik memasuki zona ketidakjelasan, sebab yang politik dan apa yang di luar politik memasuki zona abu-abu. Agamben turut menaruh perhatiannya pada bidang bio-politik yang baginya menentukan kemunduran politik modern. Kemunduran ini terjadi bertepatan dengan transformasi politik menjadi bio-politik karena pemerintah tidak lagi mengurus hal-hal teritorial (*warfare*), tetapi mulai menaruh perhatian pada urusan kesehatan populasi (*welfare, notion's health*) tepat pada momen di mana situasi krisis muncul.¹⁴

Lebih lanjut, Agamben menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak pernah mencegah *chaos*, tetapi sebaliknya mencoba membiarkan, mengatur dan mengarahkan situasi krisis ke arah yang mereka inginkan, sebab "*crisis means you*

¹²Bdk. Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer, op.cit.*, hlm. 7.

¹³"Apabila politik hari ini tampak melewati gerhana tanpa henti, hal ini dikarenakan politik gagal memperhitungkan kejadian yang menentukan fondasi abad modern. Misteri-misteri di abad ini yang ditunjukkan sebagai alasan sejarah dan masih bersama kita (*Nazi*) akan terselesaikan melalui bidang bio-politik di mana misteri-misteri ini terbentuk. Hanya dalam horizon bio-politik akan menjadi mungkin untuk memutuskan kategori oposisi yang mana yang menjadi landasan politik modern (kanan/kiri, privat/publik, absolut/demokrasi), dan yang mana terus menerus tidak diselesaikan, dan tampak hari ini memasuki zona ketidakjelasan". *Ibid.*

¹⁴Konsep bio-politik Giorgio Agamben merupakan konsep politik yang terstruktur secara historis. Agamben mengamati peristiwa yang menentukan peralihan ke ambang modernitas, seperti negara totaliter abad kedua puluh atau kamp *Nazi*. Pada peristiwa tersebut, kekuasaan berkaitan dengan ekspansi besar-besaran (urusan teritorial atau *warfare*). Namun, memasuki ambang modern, kekuasaan relatif dan terbatas. Ketika krisis muncul pada ambang modern, negara mulai mengarahkan perhatiannya pada kontrol populasi dan negara membuat masyarakat patuh melalui institusi empirik seperti hukuman atau penjara. Hal ini, memang tidak lagi berkaitan dengan momen seperti perang, namun keputusan untuk membuat kekuasaan menjadi tidak terbatas mendapati momen partikularnya dalam situasi ini. Oleh karena itu, bio-politik menjadi penentu kemunduran politik modernitas dan bio-politik merupakan momen kontinuitas dari peristiwa yang menentukan ke ambang modernitas.

must obey!”¹⁵ Hal ini kemudian menimbulkan keadaan pengecualian (*state of exception*) yang muncul di seluruh area untuk mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat.¹⁶ Agamben mengamati hal ini dan ia menyatakan secara kontroversial, “*today is not the city but rather the camp that is the fundamental biopolitical paradigm of the west.*”¹⁷ Bagi Agamben, bahaya laten kepedulian politik pada kehidupan populasi ialah munculnya kamp¹⁸ sebagai situasi final yang menelanjangi seluruh kualitas kemanusiaan dalam kehidupan privat dan biologis warga negara.

Konsep bio-politik Agamben merupakan konsep yang berupaya mengelaborasi dan melengkapi konsep bio-politik Michael Foucault. Menurut Agamben, Foucault meninggalkan teori bio-politik sebagai sebuah pertanyaan yang mesti dielaborasi lebih lanjut. Foucault melihat norma yang diterapkan sebagai sesuatu yang terpisah dari teori kedaulatan. Foucault menulis, “*law must be armed (.....) it is no longer a matter of bringing death into play in the field of sovereignty.*”¹⁹ Namun, Agamben sebaliknya menunjukkan, “*it can even be said that the production of a biopolitical body is the original activity of sovereign power. In this sense biopolitics is at least as old as the sovereign exception*”.²⁰ Agamben mengklaim sumber norma utama yang kemudian mempengaruhi kehidupan dalam politik bersumber pada keadaan pengecualian kekuasaan kedaulatan (*the sovereign*).

¹⁵Peppe Savà, “An Interview With Giorgio Agamben: God didn't die, he was transformed into money”, dalam *Libcom.org*, <https://libcom.org/article/god-didnt-die-he-was-transformed-money-interview-giorgio-agamben-peppe-sava>, diakses pada 2 Juni, 2024.

¹⁶Bdk. Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer*, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁷“Hari ini bukanlah kota melainkan kamp yang merupakan paradigma biopolitik fundamental Barat.” *Ibid.*, hlm. 148.

¹⁸Dalam konsep bio-politik, term kamp Agamben tidak merujuk pada kamp Nazi yang secara klise adalah tempat pembantaian masif. Kamp di sini merupakan sebuah paradigmologi, kerangka berpikir yang melihat pengetahuan secara historis (*arche*) sebagai kontinuitas. Dalam konteks biopolitik Agamben, kamp merupakan (1) kontrol pemerintah yang ketat atas kehidupan privat dan biologis individu, (2) tempat inklusi-eksklusi yang memungkinkan subjek politik tinggal dalam fiksi kedaulatan. Bdk. Morag Goodwin, “An Interview with Giorgio Agamben,” *German Law Journal*, 5:5 (2004), hlm.609-614.

¹⁹“Hukum harus dipersenjatai (...) ini bukan lagi masalah membawa kematian ke dalam bidang kedaulatan.” Michael Foucault, *The History of Sexuality-Volume I: An Introduction*, *loc.cit.*,

²⁰“Bahkan dapat dikatakan bahwa produksi tubuh bio-politik adalah aktivitas asali dari kekuasaan berdaulat. Dalam hal ini, biopolitik sama primordialnya dengan kekuasaan berdaulat.” Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer*, *op.cit.*, hlm. 9.

Vanessa Lemm dalam *Agamben's Philosophical Lineage*, menjelaskan posisi Giorgio Agamben yang mengelaborasi, mengoreksi dan melengkapi konsep bio-politik Michael Foucault,

Here Agamben regrets that Foucault did not build on Hannah Arendt's *The Human Condition*, which twenty years before the publication of Foucault's *The History of Sexuality* had already fully articulated 'the process that brings *homo laborans*- and with it, biological life as such, gradually to occupy the very centre of the political scene of modernity. Moreover, Agamben remarks that Foucault did not pay sufficient attention to the 'exemplary places of modern biopolitics: the concentration camp and the structure of great totalitarian states of the twentieth century.'²¹

Di sisi lain, melalui bio-politik Agamben mendekonstruksi kanon metafisik politik Barat yang diletakkan Aristoteles. Agamben melihat pemisahan antara kehidupan yang layak dalam politik dan kehidupan yang tidak layak dalam politik sebagai sesuatu yang problematis. Menurut Aristoteles, kehidupan politik adalah kehidupan yang autarki, yakni individu politis adalah subjek yang telah berdaulat di dalam politik. Maka, bentuk kehidupan yang tidak autarki boleh diabaikan dan pada momen yang paling patetis, dapat dimusnahkan. Karakterisasi politik melalui mekanisme pemisahan antara yang autarki dan tidak menjadikan politik sejak awal pembentukannya sebagai komunitas yang mendasari aktus politik pada mekanisme pengecualian atas kehidupan. Logika ini diwarisi pada abad modern dan Agamben menambahkan bentuk kehidupan ketiga yakni *bare life* atau kehidupan telanjang dari figur *homo sacer* yang boleh diabaikan hak-hak hidupnya. Agamben mengangkat figur *bare life* dari kehidupan para pengungsi atau imigran, korban perang, atau tahanan di kamp Austwich seperti *the Mussleman*, untuk mendekonstruksi aporia metafisik politik Barat yang diletakkan Aristoteles.

²¹“Di sini, Agamben menyesali bahwa Foucault tidak membangun konsepnya pada karya *Human Condition*, Hannah Arendt, yang pada dua puluh tahun sebelum publikasi *The History of Sexuality*, telah memasukkan *homo laborans* dan dengan itu, kehidupan biologi itu sendiri, masuk menjadi apa yang paling intim dalam bidang politik modern. Lebih dari itu, Agamben menyatakan bahwa Foucault tidak menaruh perhatiannya pada 'tempat konkret' bio-politik modern: kamp konsentrasi dan struktur negara totaliter pada abad kedua puluh.” Adam Kotsko dan Carlo Salzani (ed.), *Agamben's Philosophical Lineage*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), hlm. 53.

Dalam konsep bio-politik, Agamben menekankan dua tesis utama, yakni *pertama*, pengecualian kekuasaan berdaulat. Pengecualian ini membentuk relasi ontologis politik dan kehidupan dalam bentuk penelantaran; “*the original political relation is the ban (the state of exception as zone of indistinction between outside and inside, exclusion and inclusion)*”.²² Agamben mengamati bahwa dalam keadaan ini, penguasa memanfaatkan anonimitas hukum untuk mengokohkan tatanan kekuasaannya dan politik menjadi bio-politik yang memisah-misahkan, melakukan proses inklusi-eksklusi, yang pada momen partikular memroduksi kehidupan telanjang (*bare life*) dari figur *homo sacer*, yaitu manusia sakral yang boleh diabaikan hak-hak hidupnya dalam kultur politik. Agamben mengikuti saran Benjamin dan Foucault, bahwa kedaulatan dalam arti *Theology Politics* Schmit, sebagai “*he who decides in the state of exception,*”²³ mesti dipertimbangkan kembali melalui perspektif bio-politik. Di sisi lain, keadaan pengecualian yang masuk di seluruh area, mengaburkan makna hukum dan kekerasan. Dalam keadaan ini, terdapat ketidaksesuaian antara hukum dan fakta politik, sebab kekuasaan berdaulat dapat memalsukan makna bahasa sebagai unsur ontologis politik untuk melakukan malaise. Émile Benveniste menyebutnya dengan eufemisme, “ekspresi kreatif kekuatan kedaulatan” di mana penguasa dalam situasi krisis memutuskan hukum ekstra-yuridis di luar hukum normal.²⁴

Kedua, penekanan Agamben pada forma kehidupan, bahwa tidak ada satu jenis kehidupan yang tidak layak dalam politik. Agamben mengeritik relasi politik peradaban Barat sejak Aristoteles dengan menulis, “*all living beings are in form of life, but not all are (or not all are always) a form of life (...)* In this sense, *form of life is the revocation of all factual vocation*”.²⁵ Dengan kata lain, bio-politik yang sejak awal melakukan pemisahan dan pengecualian atas kehidupan memungkinkan pengabaian terhadap kehidupan faktikal individu, sebab individu

²²*Ibid.*, hlm. 143.

²³Carl Schmitt, *Political Theology, four chapters on the concept of sovereignty*, penerj. George Schwab (Chicago: Chicago University Press) hlm. 5. Lih. juga, Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer, op.cit.*, hlm. 167.

²⁴Giorgio Agamben, *Ibid.*, hlm. 232.

²⁵“Semua makhluk hidup berada dalam bentuk kehidupan, tetapi tidak semuanya (atau tidak selalu semuanya) merupakan bentuk kehidupan (...) Dalam arti ini, bentuk kehidupan adalah pencabutan semua panggilan faktikal.” *Ibid.*, hlm. 1277-1278.

politik dan seluruh hak hidup bukan lagi sesuatu yang otonom di dalam dirinya, tetapi telah menjadi sesuatu yang sepenuhnya diputuskan oleh kekuasaan kedaulatan.

Bertolak dari uraian di atas, penulis merangkum karya ilmiah ini dengan judul: **“Bio-politik: Mengkaji Relasi antara Politik dan Kehidupan Menurut Giorgio Agamben”**. Dalam karya ilmiah ini, penulis mengkaji konsep bio-politik dan relasi antara politik dan kehidupan menurut Giorgio Agamben.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam karya ilmiah ini, penulis menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar berikut: *Pertama*, “Siapa Giorgio Agamben, apa latar belakang pemikiran, metode, konsep-konsep dasar filsafat politiknya dan apa saja karya-karyanya?” Penulis menjawab pertanyaan ini pada bab II karya ilmiah ini. *Kedua*, “Apa itu bio-politik dan bagaimana relasi antara politik dan kehidupan menurut Giorgio Agamben?” Penulis menjawab pertanyaan ini pada bab III karya ilmiah ini.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan umum: *Pertama*, mengkaji konsep bio-politik dan relasi antara politik dan kehidupan menurut Giorgio Agamben. Melalui kajian bio-politik, penulis merefleksikan relasi antara politik dan kehidupan dan mengupayakan keselarasan antara hukum dan fakta politik.

Kedua, memperkenalkan siapa itu Giorgio Agamben. Dalam karya ilmiah ini, penulis memperkenalkan filsuf Giorgio Agamben, latar belakang pemikiran, metode filsafat, konsep-konsep dasar filsafat politik dan karya-karyanya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero). Sebagai seorang mahasiswa filsafat, karya ilmiah ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mendalami dan memperkenalkan gagasan filsuf Giorgio Agamben ke tengah ruang diskursus filsafat politik kontemporer.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat karya ilmiah ini adalah sebagai salah satu acuan bagi para pembaca untuk memahami konsep bio-politik Giorgio Agamben dan kemudian menjadikan pembaca pribadi yang lebih kritis dan tanggap terhadap perkembangan realitas filsafat politik, terkhususnya dalam dinamika konteks filsafat dan politik di Indonesia.

1.5 Metodologi Penulisan

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penulis menyelesaikan karya ilmiah ini melalui beberapa tahapan metodologis sebagai berikut:

Pertama, penulis membaca, menerjemahkan dan memahami karya “*The Omnibus Homo Sacer*”. Karya ini menjadi referensi utama dan penting. Giorgio Agamben menggunakan metode arkeologi dan filsafat intensitas interdisipliner. Melalui metode filsafat tersebut, Giorgio Agamben mengelaborasi berbagai pemikiran, melakukan kajian terhadap berbagai ilmu sosial dan humaniora dan merangkumnya dalam karya ini.

Kedua, penulis mengkaji konsep bio-politik. Penulis mencari, menerjemahkan dan membaca karya-karya yang relevan dengan konsep bio-politik Giorgio Agamben. Hal ini melibatkan penulis dalam kerja mencari dan membaca berbagai literatur di perpustakaan IFTK-Ledalero, melakukan pencarian buku (*EPUB*), mengikuti seminar, dan mencari manuskrip yang berkaitan dengan konsep bio-politik untuk memperkaya perspektif penulis.

Ketiga, penulis melakukan kategorisasi pemikiran dan mencari intisari dari berbagai literatur yang penulis temukan. Hal ini menjadi penting untuk menguatkan perspektif penulis dalam mengkaji, menarik kesimpulan dan mendiseminasikan konsep bio-politik.

1.6 Batasan Studi

Giorgio Agamben merupakan filsuf dan intelektual yang belajar dan memahami filsafat sejak peradaban Yunani Kuno hingga abad kontemporer. Karya-karyanya mewakili kekayaan dan keluasan pembacaannya terhadap ilmu-

ilmu sosial dan humaniora. Oleh karena itu, penulis membatasi perhatian dan memfokuskan kajian karya ilmiah ini pada konsep bio-politik Giorgio Agamben dengan referensi utama *The Omnibus Homo Sacer*. Di sisi lain, berangkat dari judul karya ilmiah ini, maka penulis melupakan pembahasan tema-tema lain di luar judul tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi dalam IV bab. Bab I, Pendahuluan. Berisikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, batasan studi dan sistematika penulisan. Bab II, membahas siapa Giorgio Agamben, latar belakang pemikiran, metode filsafat, konsep-konsep dasar filsafat politik, dan karya-karyanya. Bab III, membahas genealogi dan historisitas konsep bio-politik dan bagaimana Giorgio Agamben mengelaborasi konsep bio-politik. Pada bab ini, penulis juga mengkaji relasi antara politik dan kehidupan menurut Giorgio Agamben. Bab IV, Penutup. Pada bab ini, penulis merangkum karya ilmiah ini dalam kesimpulan dan saran.